

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KOPI DI DAERAH TERTINGGAL MELALUI PENDEKATAN BISNIS INKLUSIF DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Coffee Business Development Strategy in Underdeveloped Region through Inclusive Business Approach in Southwest Sumba District

Febtri Wijayanti*, Carolina

*Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen IPTEKIN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jln. Gatot Subroto No. 10 Kuningan, Jakarta Selatan 12710, DKI Jakarta, Indonesia*

**Korespondensi penulis. Email: Wijayanti.febtri@gmail.com*

Naskah diterima: 3 November 2020

Direvisi: 25 Januari 2021

Disetujui terbit: 19 Juni 2021

ABSTRACT

The low bargaining power of small farmers put them into a disadvantage position. This is experienced by coffee farmers in Southwest Sumba District, as an underdeveloped area, which by their social economic limitation relies solely on middleman, while their coffee actually has higher value. This study examines these problems to find the best solution by utilizing local resources through an inclusive approach. Qualitative research was conducted through a case study in a disadvantaged village in Southwest Sumba District, which has intervened with appropriate technology to comprehensively handle coffee processing. The results of the study explain that the problem of coffee farmers stems from the obstacles and challenges that are typically faced by people in disadvantaged areas. Those problems are: barriers access to inputs, market, financial, and socio-cultural factors; challenges in coordination; and inability to meet standardization consistently and to bear risks. These six problems become the basis for the design of the inclusive business concept that is proposed to be applied by utilizing existing physical and social infrastructure modalities in the village. The inclusive coffee business unit development strategy has the potential to assist coffee farmers in gaining access to inputs and optimizing output, but should be supported by cross-sectoral cooperation between the government institution, research and development institution, business, and the community. Efforts to develop this business model need to be carried out sustainably along with empowering farmers and increasing awareness of the stakeholder to work together in an integrated manner.

Keywords: *Coffee farmers, Inclusive Business, Sumba Barat Daya District*

ABSTRAK

Rendahnya posisi tawar menempatkan petani kecil dalam posisi merugi sehingga pendapatan usaha tani yang diperolehnya tidak memadai. Hal ini dialami oleh para petani kopi di Kabupaten Sumba Barat Daya, sebuah daerah tertinggal, yang oleh berbagai keterbatasan sosial-ekonomi menggantungkan diri hanya pada pedagang pengumpul sementara produk kopi yang mereka tanam sebetulnya mempunyai nilai lebih tinggi. Penelitian ini mengurai permasalahan tersebut untuk mendapatkan solusi dengan memanfaatkan modalitas lokal desa melalui pendekatan inklusif. Penelitian kualitatif dilakukan melalui studi kasus di sebuah desa tertinggal di Sumba Barat Daya yang telah mengalami intervensi teknologi tepat guna penanganan kopi dari hulu ke hilir. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permasalahan rendahnya pendapatan petani dari usaha kopi bermuara dari hambatan dan tantangan yang tipikal dihadapi oleh masyarakat di daerah tertinggal. Permasalahan tersebut berupa hambatan akses terhadap input, pasar, finansial, dan faktor sosial budaya; tantangan dalam koordinasi; dan ketidak-mampuan untuk memenuhi standarisasi secara konsisten serta menanggung resiko. Keenam permasalahan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi perancangan konsep bisnis inklusif yang diusulkan untuk diterapkan dengan memanfaatkan modalitas infrastruktur fisik maupun sosial yang ada di desa. Strategi pengembangan unit usaha kopi inklusif potensial untuk membantu petani kopi dalam mendapatkan akses input dan mengoptimasi output, akan tetapi penerapannya memerlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan, bisnis, dan komunitas. Upaya pengembangan usaha ini perlu dilakukan berkelanjutan dibarengi dengan pemberdayaan petani dan peningkatan kesadaran para pelaku untuk bekerja sama secara terintegrasi.

Kata Kunci: *bisnis inklusif, petani kopi, Sumba Barat Daya*

PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan perkebunan yang menjadikan kopi sebagai salah satu komoditas penting penghasil devisa negara ditetapkan dengan pertimbangan bahwa perkebunan kopi didominasi oleh perkebunan rakyat. Kebun kopi rakyat berkontribusi terhadap 96,63% produksi kopi nasional, sementara selebihnya berasal dari perkebunan yang dikelola oleh negara dan swasta (Indonesia 2020). Gambaran tersebut menunjukkan potensi mengungkit kesejahteraan petani melalui penerapan kebijakan pengembangan kopi nasional, akan tetapi pada kenyataannya petani kopi seperti halnya petani kecil pada umumnya, menghadapi tantangan dalam keikutsertaan mereka dalam dinamika usaha taninya.

Petani kecil pada umumnya menghadapi berbagai masalah antara lain kurangnya informasi, kurangnya posisi tawar di pasar, biaya operasional tinggi, dan rendahnya nilai tambah yang bisa dihasilkan (Handayati et al. 2015). Penciptaan industri berbasis pertanian menjadi salah satu upaya untuk membantu petani. Namun, pertumbuhan agroindustri di negara berkembang juga mengalami masalah dalam kesetaraan, keberlanjutan, dan inklusif, dimana kekuatan pasar yang tidak seimbang dalam rantai pasok pangan, nilai tambah, dan adanya kartel (Da Silva et al. 2009). Dengan demikian, terjadi ketimpangan akibat dari kompetisi tidak sehat diantara para pelaku pada rantai nilai pertanian. Sumberdaya yang dimiliki oleh petani kecil pada umumnya terabaikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perancangan sistem tata niaga lokal yang memberikan peluang bagi petani untuk mendapatkan nilai tukar komoditas yang memadai sangat diperlukan. Daya tawar rendah adalah masalah yang umum dihadapi oleh petani miskin di Indonesia (Rofi 2018), maupun di belahan Afrika (Fischer & Qaim 2012). Salah satu penyebab terjadinya situasi demikian adalah karena rendahnya kemampuan untuk mengakses informasi pasar yang bilamana dibiarkan akan mengakibatkan keterpurukan yang lebih dalam (Courtois & Subervie 2014).

Peningkatan daya tawar petani sebagai pemasok bahan baku dapat dilakukan melalui pelibatan aktif mereka dalam pola bisnis inklusif (Andersen & Andersen 2017). Pola bisnis inklusif menempatkan petani dalam rantai nilai bersama dengan pelaku usaha lainnya. Penerapan bisnis inklusif memberikan peluang bagi petani untuk memperoleh akses terhadap fasilitas pendukung usaha seperti modal, teknologi, dan juga pasar

(Vorley et al. 2009; Chamberlain & Anseeuw 2019). Lebih jauh lagi, bisnis inklusif merupakan model usaha yang tepat guna menjembatani pencapaian tujuan SDGs (Indonesian National Development Planning Agency 2019). Pendekatan inklusif dipercaya sebagai sebuah pendekatan yang akan mengangkat petani dari ketidakberdayaan menuju kemandirian dan kesejahteraan.

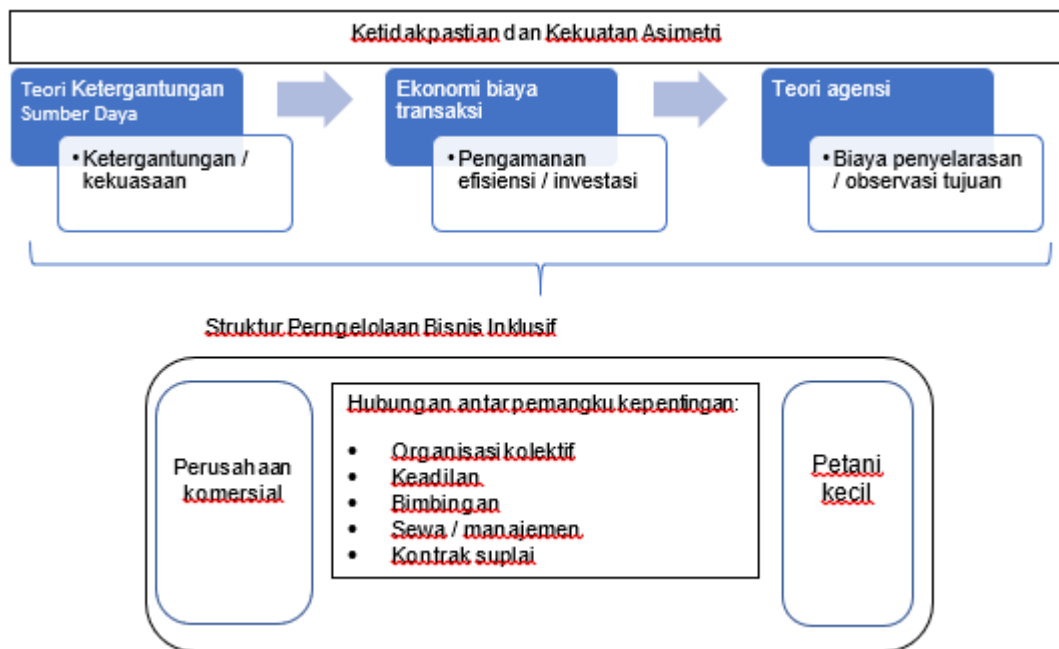
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang penerapan model bisnis inklusif pada agroindustri kopi rakyat di Sumba Barat Daya. Melalui studi kasus terhadap dinamika usaha tani kopi di kalangan masyarakat Desa Kadi Roma, dilakukan perancangan pola pengelolaan bisnis yang inklusif diselaraskan dengan kondisi sosial-ekonomi petani kopi. Sebagai salah satu dari 62 wilayah yang dinyatakan tertinggal melalui Peraturan Presiden No.63 Tahun 2020, Sumba Barat Daya menghadapi tantangan besar dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat dan mengembangkan daerahnya.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep penelitian ini adalah bisnis inklusif mampu membawa petani kecil mempunyai posisi yang setara dan berkeadilan di dalam sistem tataniaga. Bisnis inklusif dianggap mampu mengangkat kesejahteraan petani kecil (Da Silva et al. 2009; FAO 2015; Chamberlain & Anseeuw 2019). Dalam kasus petani kecil dengan kompleksitas masalah yang melekat, dibutuhkan pendorong agar model bisnis inklusif dapat dijalankan dan terjaga keberlangsungannya. FAO (2015) membagi aktor-aktor penggerak bisnis inklusif antara lain; 1) produsen, 2) pembeli, 3) lembaga publik/pemerintah, dan 4) lembaga perantara/LSM. Agar aktor-aktor tersebut dapat bergerak sesuai misi inklusifitas, maka (Chamberlain & Anseeuw 2019) membangun struktur bisnis inklusif yang lebih sederhana agar tidak terjebak dalam penggunaan tipologi struktur yang kaku. Kerangka konsep ini digambarkan pada Gambar 1.

Bisnis inklusif dengan berbagai instrument meningkatkan inklusifitas masyarakat berpendapatan rendah dan petani kecil di dalam rantai nilai komersial. Namun, masalah yang muncul kemudian adalah hal-hal terkait dengan kendali atas sumber daya, kurangnya transfer pengetahuan, dan manfaat marginal. Bisnis inklusif -yang bersifat dinamis memungkinkan dilakukannya penyesuaian untuk mengatasi



Gambar 1. Kerangka Struktur Bisnis Inklusif, diadaptasi dari (Chamberlain & Anseeuw 2019)

masalah tersebut. Dalam hal ini, negara berperan penting melalui kerangka kebijakan, yang bersama keterlibatan pihak ketiga, dapat melawan potensi korporatisasi melalui penerapan bisnis inklusif. Diharapkan bisnis inklusif lebih berperan dalam memperkuat transformasi pertanian dan pembangunan untuk kepentingan petani kecil.

Dari kerangka konsep bisnis inklusif yang dikemukakan oleh Chamberlain & Anseeuw (Chamberlain & Anseeuw 2019) yang dikuatkan oleh berbagai temuan (Da Silva et al. 2009; FAO 2015; Rofi 2018) dan konsep *collective action* Fischer & Qaim (Fischer & Qaim 2012), maka penelitian ini membahas strategi peningkatan pendapatan petani kopi di Kabupaten Sumba Barat Daya melalui bisnis inklusif.

Konsep bisnis inklusif pada komunitas petani kopi berhasil dilakukan di Bondowoso, Jawa Timur dan Banyuwangi. Permatasari et al. (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa salah satu keberhasilan Kabupaten Bondowoso dalam mengembangkan kopi adalah dengan membentuk Koperasi. Melalui koperasi, petani kopi akan lebih mudah dalam membentuk kemitraan yang menjadi salah satu kunci sukses bisnis inklusif kopi Bondowoso. Pemerintah pun juga mendorong petani kopi untuk membentuk perkumpulan atau bahkan membentuk kluster kopi di setiap wilayah yang mempunyai potensi agar lebih mudah dalam melakukan pembinaan dan pendampingan.

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Telaah terhadap permasalahan dan fenomena di masyarakat dilakukan melalui penelitian kualitatif. Metode kualitatif memberikan ruang untuk memahami pendapat dan perilaku seseorang dalam struktur sosial yang menjadi sasaran penelitian (Creswell 2009). Metode kualitatif dipilih karena metode ini merupakan pendekatan terbaik bagi pembahasan masalah penelitian yang erat terkait dengan pengalaman responden dalam kesehariannya (Sutton & Austin 2015). Oleh karena permasalahan dalam penelitian ini membutuhkan investigasi mendalam terhadap suatu kelompok yang melakukan kegiatan tertentu, dalam hal ini petani kopi dan pelaku usaha kopi olahan di suatu desa, maka disain penelitian menggunakan studi kasus (Crowe et al. 2011). Pendekatan studi kasus digunakan untuk memotret dan menganalisa fenomena yang terjadi secara mendalam dan terinci untuk memperoleh pengetahuan atas suatu fenomena (Yin, K 2003). Studi kasus dilakukan di Desa Kadi Roma Kecamatan Wewewa Tengah terhadap dinamika usaha tani kopi. Desa tersebut dipilih sebagai wilayah studi karena merupakan satu-satunya desa yang memiliki kelengkapan infrastruktur kelembagaan yang mewadahi petani kopi, dan juga usaha kecil pengolahan kopi. Lembaga yang menjadi wadah petani kopi tersebut memiliki fasilitas teknologi pendukung usaha penanganan pasca panen primer

sehingga secara *de-facto* mempunyai kapasitas dalam melakukan kegiatan produksi penghasil beras kopi yang terstandar (Carolina et al. 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka terhadap informan terpilih secara sengaja (*purposive*), sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (Patton 2002). Informan tersebut meliputi tokoh masyarakat, ketua kelompok tani, pelaku usaha, dan petani kopi yang ditokohkan (Tabel 1). Data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dikonfirmasi melalui triangulasi untuk meningkatkan keyakinan terhadap pendapat responden (Bukve 2019). Triangulasi dilakukan dengan membahas permasalahan yang sama pada lebih dari satu responden. Unsur-unsur yang dicari dalam penelitian ini menggunakan prinsip dasar penggalan informasi secara kualitatif, yaitu apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Apa masalah yang terjadi pada petani kopi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Siapa saja aktor yang terlibat? Bagaimana mekanisme bisnis yang terjadi? Mengapa itu terjadi?.

Data dalam penelitian diperoleh melalui metode observasi. Observasi dilakukan pada masa ketika peneliti melakukan intervensi teknologi di Kabupaten Sumba Barat daya selama kurun waktu 2017–2019. Untuk menghimpun data dan informasi, dilakukan *focus group discussion* (FGD) dengan kelompok tani, serta dialog antara petani dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Barat daya. OPD yang terlibat dalam kegiatan ini, antara lain Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Analisa data dilakukan secara deskriptif, dengan titik berangkat dari pembahasan permasalahan yang digambarkan menggunakan *fishbone diagram*; diagram yang dapat mengakomodasi informasi sebab dan akibat suatu masalah (Doggett 2005; Neyestani 2017). Faktor-faktor yang menjadi penyebab dari masalah pokok tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi tantangan bagi penerapan konsep pikir bisnis inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Usaha Tani Kopi di Desa Kadi Roma

Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pada wilayah geografi dan sosial budaya, dibagi atas tiga wilayah besar yakni Kodi, Wewewa, dan Laoura. Desa Kadi Roma berada di Wewewa yang secara topografis didominasi bukit dengan ketinggian antara 300–850 m dpl. Seperti halnya sebagian besar desa di Wewewa, penduduk Desa Kadi Roma menanaminya dengan tanaman kopi, dan menjadikan kopi sebagai salah satu sumber penghasilan utama bagi keluarga. Masyarakat memiliki tradisi menangani kopi dari mulai tanam, panen, sampai menjadi beras kopi yang siap diolah, kemudian lanjut dengan menerapkan teknologi sederhana yang tersedia di lingkungan (Wijayanti et al. 2019). Beras kopi adalah produk yang diperjual belikan di pasar lokal, sedangkan bubuk kopi yang dikonsumsi di keseharian umumnya merupakan hasil olahan beras kopi sendiri di setiap rumah tangga.

Pada tahun 2015, Desa Kadi Roma dikuatkan oleh hadirnya kegiatan UKM pengolah kopi yang

Tabel 1. Informan yang dikumpulkan dalam penelitian

Informan	Cakupan pertanyaan
Kepala desa	peran usaha tani kopi sebagai mata pencaharian masyarakat, tata niaga
Ketua asosiasi petani kopi "KD"	peran asosiasi petani kopi dalam membantu petani
2 orang ketua kelompok usaha pengolahan kopi; yakni UKM "AKS" dan UKM "Ha"	kegiatan proses produksi kopi olahan dari perolehan bahan baku sampai pemasaran produk akhir
3 orang tokoh petani kopi anggota asosiasi kopi desa	kegiatan budi daya tanaman kopi, panen, penanganan pasca panen dan penjualan hasil
3 orang tengkulak	Pola tata niaga kopi
Kepala Dinas Pertanian dan Kabid. Perkebunan Kab. Sumba Barat Daya	Kebijakan dan program Pemda terkait komoditas kopi, pandangan potensi kopi ke depan
Kepala BPMD Kab. Sumba Barat Daya	Pandangan pembentukan asosiasi/kelompok petani kopi, program/kebijakan desa terkait kopi

didukung oleh riset-aksi penerapan Teknologi Tepat Guna. Penguatan teknologi terhadap UKM (selanjutnya disebut UKM “AKS”) tersebut menghasilkan kemampuan untuk memproduksi kopi bubuk dan kopi sangrai yang berkualitas. Pada tahun 2018, lahir lagi satu UKM pengolah kopi dengan kapasitas lebih kecil dibandingkan UKM “AKS” yang memanfaatkan teknologi prosesing kopi sederhana namun juga mampu memproduksi kopi bubuk sesuai standar. Pada tahun yang sama, Desa Kadi Roma menggolongkan kesepakatan membentuk kelompok tani kopi yang difasilitasi dengan infrastruktur penanganan pasca panen primer. Kelompok tersebut dirancang sebagai embrio dari sebuah unit pengolah kopi dan diarahkan untuk menjadi lembaga yang melindungi kepentingan sosial ekonomi petani kopi.

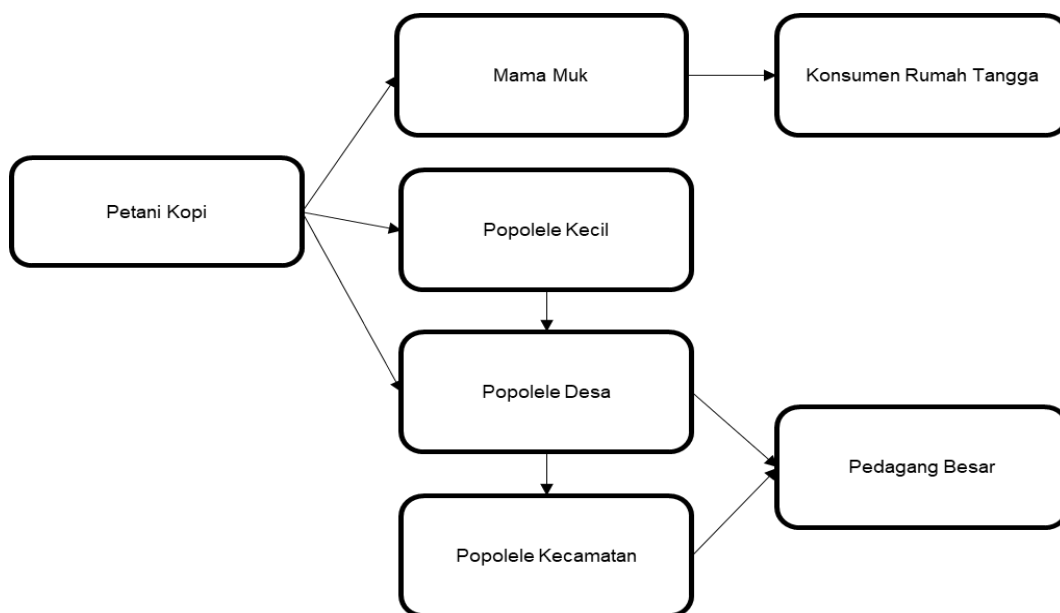
Kadi Roma, seperti sebagian besar desa-desa di Sumba Barat Daya, merupakan desa berbasis pertanian. Sebagian besar penduduknya adalah petani yang menjadikan tanaman kopi sebagai salah satu sumber pendapatan keluarga. Petani menjual hasil panennya di pasar lokal dalam bentuk beras kopi. Usaha tani kopi menyumbang sekitar 40% dari penghasilan keluarga, selebihnya diperoleh dari hasil kebun lainnya seperti pinang, kelapa, vanili, kakao, juga tanaman buah serta sayuran (Carolina et al. 2017).

Isu yang ada di petani kopi Desa Kadi Roma adalah pendapatan yang rendah. Pendapatan

yang rendah ini dikarenakan harga kopi yang fluktuatif dan tidak ada perbedaan harga untuk berbagai kualitas kopi. Kualitas baik maupun buruk diberi harga yang sama. Harga ditentukan oleh tengkulak, atau dalam Bahasa Sumba disebut sebagai *Popolele*. Wilayah yang jauh dari kota dengan biaya transportasi yang cukup mahal, membuat petani kopi sangat tergantung pada tengkulak/*popolele*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, didapatkan pola distribusi kopi beras yang dilakukan sejumlah tengkulak dan biasa terjadi di Desa Kadi Roma, dan umumnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pola tersebut tertuang dalam Gambar 2.

Biasanya petani yang tidak terikat perjanjian ijon/gadai akan menyimpan hasil panen kopi dalam bentuk kopi beras (*green bean*) dan menjualnya sesuai kebutuhan. Di setiap desa terdapat pasar yang beroperasi dua kali dalam seminggu. Khusus di Desa Kadi Roma, hari pasar adalah hari Rabu dan Sabtu. Di Pasar ini terdapat dua jenis tengkulak, yaitu yang biasa disebut dengan *Mama Muk* dan *Popolele* kecil. *Mama Muk* adalah sebutan untuk pedagang kopi perempuan yang akan membeli kopi dari petani dan menjual kembali di pasar tersebut. Sedangkan *Popolele* kecil akan menghadang petani kopi yang akan menjual kopi di area depan pasar. *Popolele* tidak menjual kopi di pasar, melainkan akan menjual ke *Popolele* lain yang skalanya lebih besar. *Popolele* akan menjual



Catatan: *Popolele* adalah bahasa daerah yang berarti tengkulak; *mama muk* adalah pedagang kopi perempuan yang beli-jual kopi di pasar yang sama.

Gambar 2. Alur Tataniaga Kopi di Desa Kadi Roma, Kabupaten Suma Barat daya

kopi beras yang berhasil dikumpulkan ke pedagang besar, yang akan membawa kopi beras di Kabupaten Sumba Barat Daya keluar pulau, seperti Kupang dan Surabaya.

Selaras dengan temuan Courtois & Subervie (2014), petani kopi di Desa Kadi Roma berpendapatan rendah (Gambar 3), karena tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menjual beras kopi. Rendahnya posisi tawar petani dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi mereka sehingga opsi untuk memasarkan hasil panennya menjadi terbatas. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara mendalam dengan informan dituangkan dalam Gambar 3.

Permasalahan petani di Kabupaten Sumba Barat Daya mencakup banyak hal yang perlu untuk dieksplorasi. Masalah utama pada isu ini adalah pendapatan petani kopi yang rendah. Padahal, kopi menyumbang 40% untuk pendapatan kebun yang mereka kelola, sisanya dipenuhi dengan tanaman lain di kebun, seperti pinang, cengkeh, vanili, kakao, buah-buahan, dll (Carolina et al. 2017). Permasalahan tersebut dicoba untuk dibagi dalam lima masalah kunci, yaitu sumber daya manusia, produktivitas, modal, dan pasar/tata niaga.

1. Sumber daya manusia petani kopi

Rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh petani adalah setingkat Sekolah Dasar (SD), dengan usia yang sudah di atas 50 tahun. Sebagai besar anak muda di wilayah ini lebih memilih bekerja di luar Pulau Sumba, sebagai akibat dari terbatasnya lapangan kerja. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, kemampuan adopsi teknologi maupun pengetahuan baru juga rendah. Selain itu, kemiskinan membuat petani tidak mempunyai cukup keberanian untuk menanggung risiko atas teknologi baru atau pengetahuan baru yang mereka aplikasikan. Hal

ini mengindikasikan bahwa inovasi dan jiwa kewirausahaan petani masih tergolong rendah, sehingga sistem pertanian di Kabupaten Sumba Barat daya cenderung masih subsistem. Jejaring antar petani maupun dengan komunitas eksternal diperlukan agar bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi yang lebih luas.

2. Lahan dan metode budi daya

Rata-rata petani kopi di Kabupaten Sumba Barat Daya masih belum melaksanakan prinsip *Good Agriculture Practices (GAP)*. Fenomena ini jamak terjadi di beberapa wilayah, seperti di dalam temuan Rofi (2018) dimana petani kopi di Desa Boafeo, Kabupaten Ende masih memakai cara tradisional dan belum menerapkan GAP. Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya menerapkan sistem agroforestri, dimana *kalio* (sebutan untuk kebun, bagi masyarakat Sumba) tidak spesifik untuk hanya satu jenis tanaman, dan biasanya ditanami dengan tanaman yang mampu memberikan pendapatan tahunan (Carolina et al. 2019). Biasanya *kalio* berisi tanaman, antara lain kopi, pinang, cengkeh, jati, mahoni, kakao, dll. Bagi masyarakat pedesaan, kebun tradisional semacam ini adalah ladang untuk sistem ketahanan pangan rumah tangga mereka, menjadi lahan pekerjaan bagi seluruh anggota keluarga, proteksi terhadap biodiversitas yang sudah dimiliki, serta harus juga dipandang sebagai sumber kekuatan sosial mereka (Anderson 2011).

Akibat dari kurangnya perawatan kebun, tanaman kopi banyak yang terserang penyakit. Jika sudah terserang hama dan penyakit, maka jumlah dan kualitas panen sudah pasti akan menurun. Hal ini terjadi dikarenakan mereka belum mengetahui praktik budi daya yang baik untuk tanaman kopi. Mereka hanya sekedar



Gambar 3. Analisa Fishbone Permasalahan Petani Kopi di Desa Kadi Roma, Kabupaten Suma Barat Daya

memanen hasilnya ketika masa panen sudah tiba. Bahkan metode panen yang diterapkan masih panen racutan, dimana mereka akan mengambil semua buah di pohon walaupun ada yang masih hijau.

3. Pasar dan tata niaga

Tidak adanya pasar alternatif membuat petani tidak memiliki pilihan lain untuk menjual hasil kebunnya. Petani sangat tergantung dengan pasar di kota untuk menjual hasil kebun. Namun, jarak pasar yang cukup jauh dan biaya transportasi yang mahal membuat petani bergantung kepada tengkulak. Tengkulak-tengkulak yang mengumpulkan kopi beras dari petani di desa akan menjualnya ke toko/kios yang ada di kota. Kios/toko yang sering mereka sebut itu adalah tengkulak besar yang menampung komoditas-komoditas perkebunan untuk kemudian mereka jual ke luar Pulau Sumba.

Petani bergantung kepada tengkulak yang merupakan kepanjangan tangan dari pedagang besar yang akan membawa kopi ke luar Pulau Sumba (lihat Gambar 2). Masing-masing tengkulak akan mengambil selisih Rp 500–Rp1500 per kg kopi beras yang mereka ambil. Bagi petani praktik yang diterapkan oleh tengkulak selama ini dapat diterima dan dianggap wajar.

UKM pengolah kopi menjadi kopi bubuk biasanya mendapatkan kopi dari hasil panen sendiri dan dari petani. Jika masih kurang, UKM akan mencari di pengepul menengah. Namun dalam berbagai kesempatan, pasokan kopi beras dari petani ke UKM tidak konsisten. Sistem ijon/gadai yang dilakukan oleh petani kepada tengkulak menghambat konsistensi kualitas dan kuantitas suplai kopi beras ke UKM.

Hasil wawancara mendalam dengan tokoh petani dan tokoh masyarakat, menggambarkan persepsi petani terhadap praktik yang dilakukan oleh tengkulak. Mereka menganggapnya sebagai praktik yang dapat diterima dan wajar. Tengkulak membantu petani dalam menampung hasil panen kopi apapun kualitasnya. Tengkulak juga menjadi penolong petani yang membutuhkan uang karena dapat memberikan pinjaman secara mudah. Mereka bisa membayar hutang dengan hasil panen kopi walaupun seringkali akibat hutang, posisi tawar petani menjadi rendah. Petani dan tengkulak-tengkulak yang ada di desa biasanya masih memiliki garis kekerabatan satu dengan yang lain. Dalam masyarakat Sumba Barat Daya, hubungan erat jalur kekerabatan di dalam satu wilayah (desa, kecamatan) masih sangat besar terjadi. Kedekatan hubungan sosial antara tengkulak

dan petani secara tidak langsung merugikan petani yang menjadi abai meskipun mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Berpegangan pada prinsip inklusifitas, dibutuhkan penataan peran dan letak duduk para pihak di dalam sistem tata niaga yang tidak merugikan petani tanpa harus meniadakan peran dan profesi tengkulak. Hubungan jual beli kopi yang merupakan komoditas unggulan desa, seyogyanya dibangun dengan prinsip kesetaraan mengikutsertakan tokoh masyarakat, formal maupun informal, sebagai penengah yang memastikan kegiatan jual beli yang tidak merugikan petani.

4. Modal

Modal adalah masalah klasik untuk setiap petani kecil. Ketiadaan modal juga menjadi alasan mereka tidak menggunakan pupuk, tidak merawat kebun, dan melakukan peremajaan. Masalah yang terjadi disini adalah petani tidak mempunyai cukup akses terhadap kredit dengan bunga ringan. Persyaratan administrasi yang diajukan oleh bank atau Lembaga finansial formal seringkali tidak dapat mereka penuhi. Misalnya, masalah jaminan. Lokasi bank yang hanya ada di kota membuat petani di daerah desa/pelosok kabupaten enggan untuk datang. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh penyedia dana non formal. Tengkulak adalah salah satu penyedia dana pinjaman non formal tersebut.

5. Teknologi pascapanen

Teknologi masih menjadi barang mahal untuk petani kopi. Ketiadaan unit pengolah hasil untuk menyediakan teknologi adalah salah satu masalah yang muncul. Petani masih menggunakan cara tradisional untuk merawat dan mengolah kopi. Pengolahan pasca panen yang mereka kenal masih tradisional. Mereka belum melakukan petik merah sebagai standar dalam panen kopi. Cara panen yang biasa dilakukan adalah memetik semua buah kopi dengan cara racutan, biji kopi yang sudah merah maupun masih hijau akan dipetik semua dalam sekali proses pemetikan. Petani kopi juga tidak melakukan sortir kopi berdasar kualitas. Sebagian besar petani menjemur kopi di tanah tanpa alas, mengupas kulit merah dengan menggunakan batu titi, dan mengupas kulit tanduk kopi masih dengan menggunakan lumpang alu. Mereka juga masih menggunakan wajan gerabah untuk menyangrai kopi sampai menjadi hitam arang.

Dari praktik-praktik pengolahan pasca panen yang secara turun temurun mereka dapatkan sejak nenek moyang, mengakibatkan banyak kopi beras yang cacat, rusak, atau pecah. Jika

banyak biji kopi yang seperti itu, kualitas kopi dikatakan tidak berkualitas. Ketiadaan unit pengolah hasil di wilayah-wilayah penghasil kopi untuk menyediakan teknologi adalah salah satu masalah yang muncul. Unit pengolah hasil di wilayah kopi diperlukan untuk membantu petani kopi secara cepat dapat mengolah buah kopi merah agar tidak membusuk akibat lambatnya proses pengolahan. Unit pengolah hasil juga menjadi kebutuhan petani sebagai unit penyedia teknologi/peralatan pengolahan kopi.

Inti dari semua permasalahan pada masyarakat petani kopi di Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan pada analisis di atas adalah kurangnya akses terhadap input produksi maupun kepada pasar output. Kedua hal tersebut, yaitu kemampuan petani melakukan proses produksi dengan input yang sesuai dan akses petani kepada pasar menjadi elemen penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan (Fischer & Qaim 2012).

Konsep Bisnis Inklusif Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Petani

Berdasarkan permasalahan dalam usaha tani kopi yang mengakibatkan rendahnya pendapatan petani dari hasil kebunnya, dan potensi yang dimiliki oleh Desa Kadi Roma, dirancang konsep pengembangan usaha tani kopi menggunakan pendekatan bisnis inklusif. Inklusifitas dalam bisnis memungkinkan para pelaku berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika usaha yang tujuannya disepakati bersama (Arpin et al. 2016). Pendekatan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kekhasan kondisi sosial ekonomi petani seperti rendahnya pendidikan, luasan lahan garapan, dan eratnya kekerabatan (Wijayanti et al. 2019).

Untuk produk kopi dapat diterima oleh konsumen, maka produk harus memenuhi kriteria yang dibutuhkan konsumen/pasar (Addinsall et al. 2017). Dari permasalahan yang diidentifikasi, produktivitas rendah dan kualitas kopi yang tidak konsisten menjadi masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Masalah yang terkait dengan rendahnya produktivitas lahan ini dapat ditangani bilamana komunitas petani mempunyai akses terhadap pengetahuan. Akses terhadap pengetahuan dan dukungan infrastruktur yang dibutuhkan, dapat diperoleh melalui format pendampingan yang tersedia melalui kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan penyuluhan (penyuluh pertanian). Pelayanan penyuluhan ini lebih mudah diperoleh manakala petani ada dalam suatu kesatuan

kelompok yang dikuatkan dalam format kelembagaan formal.

Kolaborasi antara petani dan pengusaha agribisnis yang berkeadilan adalah sebuah strategi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha. Memperpendek rantai tata niaga, memperbaiki teknologi budi daya dan teknologi pasca panen, menjamin pemasaran komoditas dengan harga yang adil, memunculkan kewirausahaan sosial untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kopi, adalah strategi yang bisa diterapkan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Escobal et al. (2000) dan Fischer & Qaim (2012) bahwa perlu adanya perubahan-perubahan untuk mendorong petani berkompetisi dan melakukan inovasi dalam proses bisnisnya, sebagai bagian dari upaya pembangunan masyarakat pedesaan.

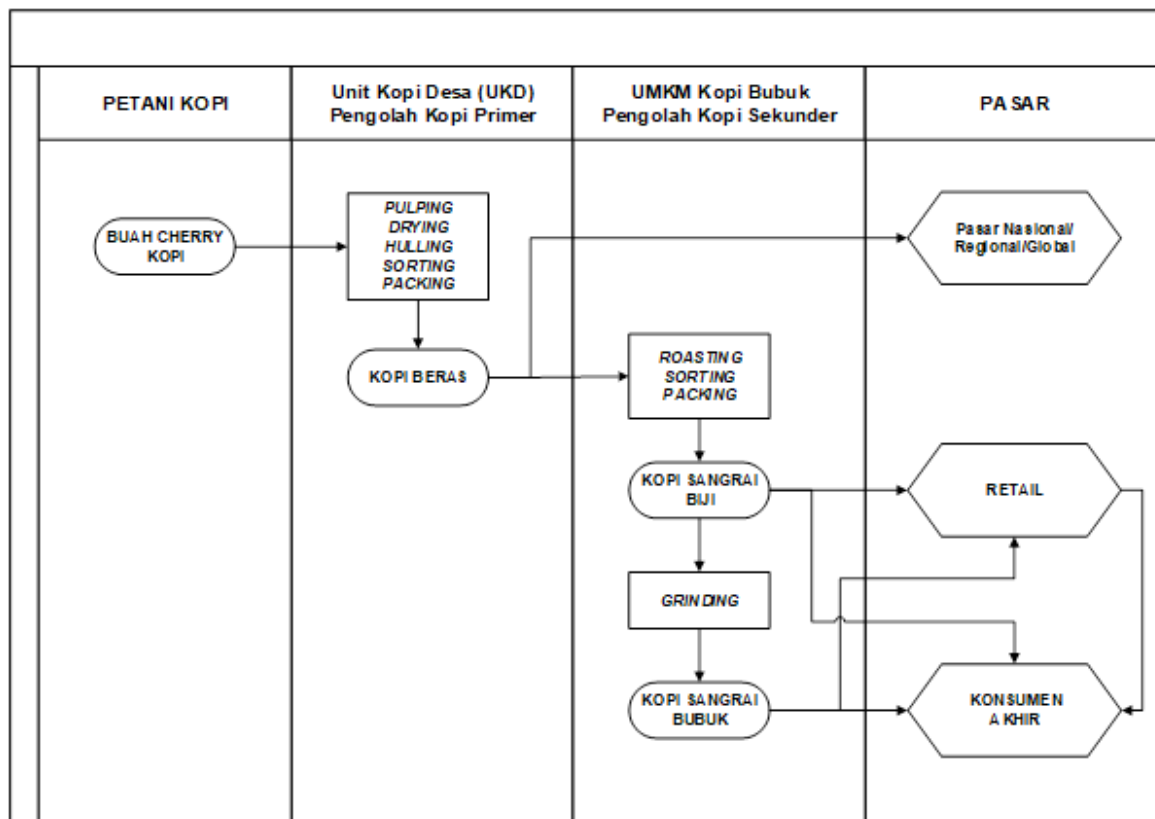
UIJ kaitan dengan kemampuan adaptasi masyarakat pedesaan di wilayah tertinggal, perlu untuk memperhitungkan kondisi sosial budaya setempat. Oleh karena itu pengembangan usaha pengolahan kopi rakyat tetap mengakomodir penggunaan mekanisme ekonomi tradisional/adat, sambil terus mendorong aktivitas ekonomi berkelanjutan di tingkat individu dan rumah tangga dengan memperkuat jejaring tingkat komunitas ke tingkatan wilayah yang lebih luas. Dengan merancang strategi integrasi antara petani kopi tradisional dan pengusaha kopi dengan prinsip relasi usaha yang berkeadilan, diharapkan adanya kesetaraan dalam pembagian nilai tambah untuk petani kopi. Untuk itu, menciptakan rantai nilai berbasis bisnis inklusif adalah sebuah rancangan untuk memberdayakan petani kopi agar dapat sejahtera dan memiliki kemandirian. Sejalan dengan pemikiran tersebut, pada kurun waktu tahun 2017 – 2019 di Desa Kadi Roma sebagai komunitas sasaran, dilakukan intervensi kepada petani kopi melalui program riset aksi, melalui penerapan teknologi tepat guna pasca panen komoditas kopi dan rekayasa sosial. Rekayasa sosial dilakukan dengan membentuk asosiasi petani kopi, yang sebelumnya belum pernah ada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Inklusifitas mensyaratkan adanya kesepakatan di dalam komunitas (Arpin et al. 2016). Kesepakatan tersebut adalah hasil dari diskusi flok terhadap isu yang dibawa, kemudian menghasilkan kesatuan pikir dan visi misi. Kesatuan pandangan tersebut yang dilembagakan sebagai modal organisasi. Setiap orang di dalam organisasi memiliki peran masing-masing. Setiap peran dielaborasi dan dikolaborasikan dalam mencapai tujuan. Proses dalam mencapai kesepakatan tersebut dilakukan

melalui serial FGD dengan petani, UKM pengolah kopi, tengkulak dan pelaku perdagangan kopi baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten. Juga dilakukan dialog antara petani/masyarakat Desa Kadi Roma dan tokoh OPD dari beberapa dinas, antara lain Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta beberapa kali dengan Wakil Bupati sebagai tokoh masyarakat dan juga sekaligus tokoh adat. Dari proses FGD dan dialog tersebut dihasilkan kesepakatan untuk membentuk Asosiasi Petani Kopi Kadi Roma dan membentuk kelompok Unit Pengolah Hasil. Potensi lembaga masyarakat yang mewadahi kegiatan usaha tani kopi dan usaha pengolahan kopi dipadukan dalam sebuah kesatuan seperti skema bisnis pada Gambar 4. Petani kopi yang tergabung dalam unit kopi desa berperan sebagai penyedia buah cherry kopi. Buah cherry tersebut dihasilkan oleh petani yang telah memperoleh pengetahuan mengenai mutu standar. Model bisnis baru meletakkan petani sebagai aktor utama dalam rantai pasok kopi. Secara bersama-sama petani kopi berkolaborasi membentuk asosiasi. Asosiasi petani kopi mempunyai unit bisnis yaitu Unit Kopi Desa. Asosiasi berfungsi tidak hanya sebagai produsen

saja, tetapi lembaga baru tersebut juga berfungsi sebagai pengatur distribusi kopi di desa. Struktur organisasi didalam diatur untuk dapat memperlancar kegiatan usaha. Di dalam asosiasi tersebut dibentuk tim kerja yang terdiri dari: manager kelompok, pemasar, produksi, dan keuangan. Asosiasi petani kopi mengelola unit usaha di tingkat desa. Usaha yang dikelola yaitu sebagai penyedia kopi beras. Petani menjual kopi merah kepada Unit Kopi Desa (UKD) sebagai unit pengolah kopi primer, yang selanjutnya UKD akan memproses kopi merah menjadi kopi beras sesuai standardisasi SNI. UKD dilengkapi dengan investasi peralatan yang cukup mumpuni untuk mengelola seluruh hasil panen petani di desa tersebut.

Unit pengolahan kopi sekunder merupakan entitas usaha yang ada di desa tersebut dan diintegrasikan dalam konsep pengembangan kopi desa. Usaha tersebut sudah ada sebelumnya, kemudian dikembangkan dengan memberikan teknologi dan pengetahuan yang mendukung usaha kopi bubuk agar menghasilkan kopi bubuk yang dapat diterima pasar lebih luas. Pengolah kopi bubuk inilah yang menjadi pendongkrak nilai tambah kopi. Unit usaha kopi bubuk yang tumbuh di wilayah Desa Kadi Roma yang diintervensi, yaitu UMKM “AKS”



Gambar 4. Model Bisnis Inklusif di Desa Kadi Roma, Kabupaten Sumba Barat Daya

dan UMKM "H". Kedua UMKM ini memproduksi kopi bubuk dengan segmentasi yang berbeda disesuaikan dengan jenis teknologi yang dapat mereka adopsi.

Sebelum dilakukan intervensi teknologi, UMKM "AKS" melakukan proses produksi kopi bubuk secara tradisional. Mereka masih menyangrai kopi menggunakan wajan aluminium di atas tungku kayu. Rata-rata produksi masih sekitar paling banyak 30kg per bulan. Produk kopi bubuk dikemas hanya dengan kemasan plastik yang direkatkan dengan api lilin. UMKM ini mengandalkan pada pembelian kopi beras di pasar, dengan kualitas yang tidak dapat dikontrol. Hasil wawancara dengan pemilik UKM AKS, setelah dilakukan intervensi teknologi, UMKM "AKS" mengadopsi teknologi pengolahan kopi bubuk secara lengkap, yaitu dengan menggunakan serial peralatan bermesin standar GMP antara lain; Pulper, huller, roaster, grinder, dan sealer. Terjadi peningkatan kapasitas produksi sebesar 300% setelah adanya intervensi teknologi dan membuka "AKS" ke pasar yang lebih luas dengan perbaikan kualitas. Pada tahun 2015, sebelum ada pelatihan pengolahan kopi, UKM AKS hanya memproduksi kopi bubuk sebanyak 30kg per bulan. Pada tahun 2018, setelah ada intervensi teknologi, UKM AKS mampu mengolah kopi sebanyak 1,5ton setahun, atau rata-rata 125kg per bulan.

Pada tahun 2018, mulai terbentuk UMKM "H" yang beranggotakan sekelompok ibu yang bekerja bersama memproduksi kopi bubuk. UMKM ini terinspirasi oleh UMKM "AKS" yang menunjukkan kenaikan produksi setelah intervensi teknologi. Kapasitas produksi UMKM "H" masih 10-12 Kg per minggu. Segmen pasar masih di lokal Kabupaten Sumba Barat Daya

Semua aktor di dalam tim kerja tersebut adalah petani kopi. Masing-masing divisi diberikan pelatihan dan pengetahuan terkait tugas pokok dan fungsinya. Kopi hasil panen petani akan dikelola oleh Unit Pengolahan Kopi Desa yang dikelola oleh Kelompok Petani Kopi. Proses produksi yang dijalankan oleh kelompok ini mulai dari pengelolaan pasca panen kopi merah menjadi kopi beras. Serial kegiatan produksi, meliputi pencucian kopi merah, pengupasan kulit merah, penjemuran, pengupasan kulit tanduk, dan penyimpanan (Wijayanti et al. 2019). Asosiasi ini mempunyai rumah produksi lengkap dengan peralatan produksi mulai dari pulper, huller, dome dilengkapi rak pengering, grader, dan gudang penyimpanan. Kopi beras yang dihasilkan akan dijual ke Pengepul besar atau pembeli langsung. Kopi beras juga dijual kepada kelompok pengolah kopi bubuk di komunitas tersebut.

Sebagai wilayah dengan akses transportasi yang terbatas, maka model bisnis inklusif mempermudah mereka mengolah dan menjual hasil panen kopi. Dengan berkelompok, mereka mendapatkan kemudahan akses informasi melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, LSM, maupun swasta. Model bisnis inklusif pun menyediakan ruang bagi mekanisme kontrol kualitas dan kuantitas. Untuk itu, diperlukan pendampingan agar kelompok usaha tersebut berjalan dengan baik

Di dalam model bisnis agorindustri inklusif, kolaborasi antar aktor dalam agroindustri menjadi sangat penting. Kolaborasi adalah sebuah proses dimana aktor-aktor di dalamnya saling terbuka, membagi informasi, sumber daya, dan tanggungjawab untuk merencanakan, mengimplementasikan rencana, dan mengevaluasi aktivitas. Dengan kata lain, kolaborasi adalah perjanjian untuk bekerja bersama-sama (Graça & Camarinha-Matos 2017). Kolaborasi memungkinkan terciptanya ekosistem pendukung yang mendorong berbagi sumber daya dan pengetahuan, mendorong difusi, dan pada akhirnya memungkinkan eksperimen model bisnis (Todeschini et al. 2017). Kolaborasi mengacu pada adopsi pola pikir kolaboratif oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam jaringan nilai yang berkelanjutan. Hal ini penting dan memengaruhi parameter model bisnis yang terkait dengan penciptaan nilai (aktivitas utama, sumber daya utama, dan mitra utama), distribusi (saluran pengiriman dan hubungan pelanggan), dan potensi dampak pada biaya, struktur dan aliran pendapatan, karena banyak inisiatif kolaborasi melibatkan pembagian pendapatan (Todeschini et al. 2017).

Hambatan dan Tantangan Pengembangan Usaha Kopi Inklusif

Prinsip Model bisnis inklusif adalah memperkecil kesenjangan antar pelaku sehingga terjalin hubungan saling menguntungkan untuk kesejahteraan bersama. Di dalam kasus pengembangan agroindustri kopi inklusif di kabupaten sumba barat daya, aktor-aktor yang terlibat dalam rantai nilai adalah anggota komunitas di wilayah tersebut, merupakan bagian erat dari sistem kekerabatan masyarakat sumba. Tengkulak kecil dan menengah adalah bagian dari masyarakat, yang juga merupakan petani kopi. Kelebihan individu yang menjadi tengkulak dibandingkan dengan petani kopi biasa adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan membuat jaringan. Hubungan kekerabatan

yang erat menjadi modal sosial untuk pengembangan model bisnis baru petani kopi.

Model bisnis inklusif untuk petani kecil, memberikan peluang pengembangan ekonomi dan sosial dan lebih efektif menghubungkan para pelaku dalam rantai pasok dengan cara yang koheren dan dapat dilacak. Petani mendapatkan akses ke pasar, pengetahuan, teknologi, dan pendapatan. Sementara, pembeli lebih mampu mencari bahan baku utama, dengan spesifikasi mereka dengan biaya yang kompetitif dan dalam beberapa kasus, mempertahankan akses ke bahan baku berkualitas tinggi. Ketika pasar mengalami pergeseran dari *buyer-driven* ke pasokan terbatas, petani akan dapat memilih dari sejumlah 'pembeli pilihan' untuk menjual barang-barang mereka (Vorley et al. 2009; Lundy et al. 2012).

Inovasi dipercaya mendorong daya saing (Christofi et al. 2015; Herrera 2016), sehingga intervensi teknologi tepat guna diperkenalkan kepada petani untuk mengatasi *gap* teknologi dan pengetahuan tentang budi daya dan pengolahan pasca panen kopi. Inovasi pengolahan kopi menjadi penggerak masyarakat untuk membuat model bisnis baru. Setelah proses edukasi, dilanjutkan dengan pendampingan untuk mereka mulai mengubah proses bisnisnya. Dari yang awalnya individual memakai teknologi tradisional, beralih ke teknologi yang lebih efisien untuk mencapai kualitas biji kopi yang baik. Prasyarat penerapan teknologi tersebut adalah mereka harus membentuk kelompok usaha agar pemanfaatan teknologi lebih ekonomis dan efisien.

Salah satu tujuan utama dari rantai nilai inklusif adalah gagasan bahwa kemitraan yang lebih besar antara perusahaan utama, produsen, pelaku rantai nilai, dan konsumen dapat membantu mencapai tujuan yang disebutkan di atas (Kaminski et al. 2020). Pada kasus pengembangan usaha kopi Desa Kadi Roma, unit-unit usaha yang ada di rantai pasok tergolong industri kecil menengah (IKM) yang secara tradisi partisipasi dalam dinamika tata niaga kental dipengaruhi oleh nuansa sosial-budaya. Di dalam menelaah tantangan yang dihadapi, pemikiran Kaminski et al. (2020) tentang tujuh hal penting yang layak diperhatikan untuk dijadikan acuan dalam menerapkan model bisnis inklusif, yakni akses terhadap pendampingan, finansial, infrastruktur kelembagaan, koordinasi antar aktor, kemampuan dalam memenuhi standar dan peraturan, kemampuan menanggung risiko komersialisasi, dan faktor sosial budaya. Pada kasus usaha kopi desa di Desa Kadi Roma,

ketujuh tantangan dan strategi penyikapannya adalah seperti pada uraian berikut.

a. Hambatan akses terhadap input dan pasar

Tanaman kopi di Desa Kadi Roma sebagian besar sudah berumur lebih dari 20 tahun. Tidak ada upaya peremajaan atau pergantian bibit. Kalau pun ada pohon yang relatif muda, itu berasal dari biji kopi jatuh yang tumbuh secara alamiah. Mereka tidak memiliki akses pada sumber benih dan bibit unggul, juga pada sarana produksi penting seperti pupuk. Ketiadaan akses membuat mereka seolah membiarkan kebunnya begitu saja. Di lain pihak, petani kopi di Desa Kadi Roma yang umumnya berpendidikan rendah, memiliki keterbatasan pengetahuan budi daya maupun pasca panen kopi. Meskipun tanaman kopi telah dibudidayakan selama lebih dari 5 dekade, namun baik teknik budi daya maupun pasca panen kopi belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Bagi petani, tanaman kopi adalah tanaman kebun yang tidak terlalu membutuhkan perawatan, seperti halnya sawah. Mereka cenderung meyakini bahwa pohon kopi akan tetap berproduksi setahun sekali meski dengan perhatian minimal, sementara padi di sawah dianggap sebagai tanaman yang rentan pada kegagalan. Padahal, sama seperti umumnya tanaman budidaya, untuk dapat optimal berproduksi, kebun tanaman kopi pun membutuhkan pemeliharaan seperti pemupukan, pemangkasan, juga penanganan hama dan penyakit.

Keterisolasian terhadap informasi iptek pengelolaan kebun kopi modern, terjadi karena tidak adanya skema pendampingan pada petani maupun pengolah kopi. Pendampingan oleh penyuluh pertanian lebih banyak ditujukan pada sektor budi daya tanaman padi dan hortikultura. Ketiadaan pendampingan menyurutkan peluang aksi partisipatif pemberdayaan masyarakat.

Solusi dalam menangani masalah ini adalah bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya dan menghadirkan ahli budi daya kopi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, untuk memberikan workshop budi daya kopi. Dari kegiatan workshop ini dilanjutkan dengan memilih satu orang peserta yang menunjukkan pemahaman yang lebih baik untuk menjadi trainer bagi petani kopi lainnya. Setelah kegiatan workshop, masih juga dilakukan komunikasi dengan instruktur untuk memecahkan masalah budi daya yang sehari-hari mereka alami.

Untuk menangani masalah pemasaran, kelompok usaha AKS dan H diikutsertakan dalam pameran, baik di wilayah kabupaten maupun secara nasional. Kegiatan pameran ini juga salah

satu cara untuk mempromosikan kopi khas Sumba Barat Daya.

b. Hambatan terhadap akses finansial

Keterbatasan dana penopang usaha merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh petani kecil. Meskipun pada kenyataannya, kebun kopi petani Desa Kadi Roma minim pemeliharaan, akan tetapi masalah keuangan menjadi kendala dalam memperoleh pelayanan teknologi yang memadai untuk penanganan pasca panen. Keterbatasan itu membuat proses penanganan cherry untuk memproduksi beras kopi hanya dapat dilakukan dengan fasilitas teknologi yang tidak memadai. Penjemuran cherry misalnya, dilakukan hanya dapat dilakukan dengan menggelar buah kopi di atas terpal yang digelar di atas tanah. Mereka menyadari bahwa praktik ini membuat pengeringan tidak optimal, akan tetapi ketidakmampuan finansial untuk mengalokasikan fasilitas memadai membatasi pilihan.

Petani kopi di Desa Kadi Roma sebagian besar tergolong sebagai petani miskin yang mengandalkan hasil kebun sebagai sumber pendapatan keluarga yang utama. Tanaman kopi adalah "tabungan keluarga" yang disimpan biasanya untuk membiayai anak sekolah atau kebutuhan besar lainnya. Kondisi didesak oleh kebutuhan, seringkali membuat petani melakukan panen kopi terburu-buru tanpa menunggu buah kopi matang semua. Konsekuensi signifikan dari praktik ini adalah rendahnya mutu kopi yang dipanen. Efek desakan kebutuhan finansial dan terbatasnya akses pada sumber keuangan yang terjangkau kemampuan, adalah *belitan* ikatan petani pada pedagang pengumpul atau dalam bahasa daerah disebut *popolele*. *Popolele* akan memenuhi kebutuhan dana keluarga sebagai alat tukar kopi yang dipanen. Tidak jarang terjadi, kopi yang diserahkan pada *popolele* bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan uang yang telah dipinjamkan pada petani. Hal ini disadari oleh petani, namun mereka tidak merasa keberatan karena masalah saat itu dapat terselesaikan dengan cepat oleh jejaring *popolele*. Selain itu, tidak jarang para *popolele* ini pun terkait kekerabatan dengan petani yang dilayani, sehingga hubungan kerja antar mereka terjalin sekaligus dengan tujuan memelihara hubungan keluarga. Hal tersebut yang menjadi unsur pembeda terhadap koneksitas petani dengan lembaga keuangan formal.

Pelayanan lembaga keuangan formal, seperti bank dianggap terlalu rumit bagi para pelaku usaha kopi. Petani yang sebagian besar

berpendidikan sekolah dasar itu pun tergolong petani miskin yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan peminjaman uang. Oleh karena itu, petani lebih memilih meminjam uang pada *popolele*, dengan jaminan hasil panen yang menjadikan mereka sulit melepaskan diri, meskipun sadar merugi.

Solusi atas masalah tersebut adalah dengan melalui dua skema. Untuk kelompok petani pengolah kopi primer (asosiasi petani kopi/UKD) dapat dilakukan melalui skema dana desa. Sedangkan untuk UKM pengolah kopi sekunder, dapat mengajukan skema kredit perbankan untuk usaha mikro. Selain itu, OPD yang terkait dengan kelompok tani dan kelompok usaha diharapkan mempunyai kebijakan atau program bantuan teknologi.

c. Hambatan faktor sosial budaya

Salah satu faktor penting yang dianggap sebagai tantangan bagi pendekatan bisnis inklusif melalui berbagai penguatan termasuk membangun kesepakatan bersama dalam menjalankan usaha kopi desa adalah masalah penurunan hak penguasaan lahan. Orang tua tidak serta merta mewariskan lahan pada anak-anaknya yang sudah menikah. Meskipun, tidak berarti anak tidak memiliki akses terhadap pengelolaan lahan. Akan tetapi, keputusan atas pemanfaatan lahan tetap ada di tangan orangtua sampai kemudian penguasaan lahan dialihkan. Oleh karenanya, petani pengelola lahan, khususnya kebun tegakan, umumnya dari generasi orangtua yang berusia di atas 50 tahun. Signifikansi dari kondisi ini menjadikan alih pengetahuan dan teknologi tidak mudah karena ide baru sulit diterima. Manakala pemikiran modern dalam pengelolaan usaha kopi menuntut keterbukaan dan kesiapan dalam menerima ide, dibutuhkan intervensi tokoh masyarakat yang menjadi panutan komunitas untuk menjadi penyelaras. Pada situasi sosial budaya seperti ini dibutuhkan alokasi waktu dan tenaga yang cukup banyak untuk menyampaikan ide baru seperti halnya ide bisnis inklusif

Status sosial di masyarakat menjadi satu faktor yang memengaruhi bagaimana interaksi di antara mereka. Hal ini memiliki dampak baik maupun buruk. Dampak baiknya adalah budaya saling membantu antar keluarga dan tetangga menjadi modal sosial untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam konsep bisnis inklusif.

Dampak buruk dari kondisi ini adalah keterikatan yang kuat antara satu dengan yang lain, seringkali menjadi kendala dalam berkinerja. Sebagai contoh, kerja bersama menangani hasil panen kopi bisa terhenti bila ada kegiatan adat,

misalnya pertunangan, pernikahan, atau kematian yang harus dihadiri. Padahal, proses penanganan pasca panen adalah proses berkesinambungan yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Pasar yang menuntut konsistensi mutu tidak akan mudah dipenuhi.

Dampak baik maupun dampak buruk dari faktor kondisi sosial budaya di masyarakat terhadap upaya kelompok merupakan dinamika yang harus dihadapi. Menghadapi perubahan paradigma pengembangan usaha khususnya yang dipicu oleh fakta bahwa kopi merupakan komoditas global, dibutuhkan pendampingan dan kesadaran akan pentingnya menyelenggarakan kegiatan usaha secara berkelompok, sampai mereka menemukan titik temu dan kesepakatan adat ((FAO 2015). Pemerintah seyogyanya berperan aktif sebagai fasilitator dan sekaligus akselerator bagi terwujudnya penguatan ekonomi petani melalui penerapan bisnis yang inklusif.

Solusi yang diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengupayakan pertemuan rutin untuk mengingatkan atas komitmen dan meningkatkan kesadaran bersama terhadap kerja kelompok. Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat pemerintah perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan anggota kelompok terhadap visi misi bisnis inklusif. Selain itu, pertemuan rutin juga dapat menjadi salah satu alat untuk mencegah adanya konflik antar anggota kelompok.

d. Tantangan dalam koordinasi

Biaya tinggi dalam melakukan koordinasi dengan penyedia informasi dan teknologi menjadi tantangan signifikan bagi tercapainya tujuan inklusifitas (Hishamunda 2002). Pada kasus petani Desa Kadi Roma, kemampuan mereka untuk menjangkau ilmu dan pengetahuan sangat terbatas sementara pelayanan dari penyuluh pertanian dari pemerintah daerah dan sumber-sumber lain belum menjadi bagian dari dinamika pengembangan usaha kopi.

Hal tersebut dapat diantisipasi melalui pembentukan lembaga usaha tani yang dikelola baik serta akuntabel (Hishamunda 2002). Kepentingan petani dikemukakan oleh lembaga usaha tani yang berkemampuan untuk menjadi jembatan dalam mengkoordinasikan kepentingan petani yang dinaunginya. Terkait dengan hal tersebut, unit usaha petani kopi desa di Desa Kadi Roma telah terbentuk, dan dapat dimanfaatkan untuk menjadi penampung yang mengayomi anggotanya.

Solusi atas masalah ini adalah dengan membentuk jaringan komunikasi antar pihak melalui grup percakapan berbasis *smartphone*, yaitu petani, pendamping, dan penyedia teknologi/pengetahuan. Alat yang digunakan cukup dapat dijangkau juga oleh petani. Sampai saat ini, metode ini cukup membantu petani dalam melakukan konsultasi maupun mendapatkan akses pengetahuan.

e. Tantangan mengatasi ketidakmampuan memenuhi standardisasi secara konsisten

Petani kecil umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar sehingga mereka teraliansi dari pasar. Akan tetapi, pada kasus usaha tani kopi di Sumba, umumnya produk terstandar belum menjadi hal yang penting untuk dipenuhi. Hal ini karena pasar beras kopi dari petani adalah pasar lokal yang tidak mensyaratkan produk terstandar. Kondisi ini membuat produk terstandar tidak menjadi bagian dari proses pengelolaan produk karena pada kenyataannya seperti apapun kondisi beras kopi yang dihasilkan, pasar lokal akan menerimanya tanpa perbedaan harga. Upaya menghasilkan produk terstandar tidak dihargai lebih baik oleh pasar.

Tantangan ini dihadapi oleh unit usaha pengolah kopi "AKS" yang mengelola kegiatan usahanya dengan menerapkan proses pengolahan kopi sesuai standar dengan memanfaatkan bahan baku beras kopi yang memenuhi kriteria SNI biji kopi untuk menghasilkan bubuk kopi yang juga sesuai SNI. Upaya yang dilakukan membuahkan hasil yang baik, produk kopi bubuknya diterima pasar yang lebih luas. Upaya "AKS" ini menjadi potensi bagi desa untuk mengintegrasikannya dalam skema bisnis inklusif kopi desa dengan merangkaikan kiproh lembaga usaha tani kopi desa yang sepakat menerapkan standardisasi.

Rendahnya kemampuan atau kemauan untuk menerapkan standar tidak dapat dipertahankan manakala produk kopi diarahkan untuk bersaing di pasar nasional. Standar Nasional Indonesia baik untuk biji kopi maupun bubuk kopi sudah harus menjadi pedoman yang diterapkan, termasuk Peraturan Kementerian Pertanian tentang budi daya kopi yang baik. Mengacu pada kondisi saat ini, maka tantangan penerapan bisnis inklusif jelas memerlukan kerjasama bukan hanya pihak petani saja, akan tetapi juga aktor-aktor lain di rantai nilai termasuk pemangku kebijakan.

Beberapa solusi atas permasalahan ini adalah dengan terus menerus melakukan pendampingan kepada kelompok tani dan

kelompok usaha. Dalam beberapa hal, kinerja pendampingan oleh aktor lokal seperti penyuluh tidak dapat dilakukan lebih sering karena keterbatasan tenaga penyuluh. Namun, dengan menggunakan jaringan komunikasi seperti dijelaskan dalam poin c, pendampingan tetap dapat dilakukan dan kelompok dapat terus dipantau.

f. Tantangan mengatasi ketidakmampuan menanggung resiko

Petani kecil menghadapi berbagai risiko ketika terhubung dengan dinamika usaha, seperti kegagalan panen yang diakibatkan oleh perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, atau rendahnya input yang diberikan untuk mencapai hasil optimal dalam budidaya. Ketidakmampuan ini merupakan salah satu penyebab mereka teraliansi dari pasar yang mensyaratkan konsistensi dalam penyediaan produk. Gambaran kondisi petani ini pula yang ditemukan di kalangan petani Desa Kadi Roma. Kondisi yang dari sudut pandang profesionalisme bisnis dianggap sebagai kelemahan signifikan namun merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya memperkuat posisi tawar petani melalui pendekatan inklusif.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membentuk koperasi/perkumpulan/asosiasi. Dengan membentuk kelembagaan petani, akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan akses produksi. Bantuan-bantuan dari pemerintah maupun non pemerintah akan lebih mudah didapatkan. Selain itu, lebih mudah untuk menembus pasar karena kontinuitas terjaga ((Fischer & Qaim 2012). Ke depan, perlu adanya inisiasi asuransi untuk petani kopi. Dengan asuransi, petani akan mendapatkan jaminan atas kemungkinan resiko akibat mengadopsi teknologi atau pengetahuan baru.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengembangan komoditas kopi di wilayah tertinggal memerlukan pendekatan inklusifitas, supaya semua elemen masyarakat dapat terlibat dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam mengembangkan agroindustri kopi dengan pendekatan bisnis inklusif, perlu adanya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga riset, swasta, dan komunitas petani kopi. Kerja sama dan koordinasi yang baik, sesuai peran masing-masing akan menyelesaikan hambatan yang ada, sehingga

petani mendapatkan akses terhadap input, pasar, infrastruktur, dan keuangan. Usaha tani kopi di Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai komoditas yang mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agroindustri dengan pendekatan inklusif.

Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani kopi di daerah tertinggal, seperti di Desa Kadi Roma, Kabupaten Sumba Barat Daya, direkomendasikan faktor sosial dan budaya sebagai pendorong bagi keberhasilan agroindustri inklusif sepanjang dilakukan pendampingan yang berkelanjutan. Modal sosial di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mendorong kelompok petani kopi guna melakukan upaya-upaya yang meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan keuntungan. Upaya pengembangan usaha ini perlu dilakukan berkelanjutan, bersamaan dengan pemberdayaan petani dan peningkatan kesadaran para pelaku untuk bekerja sama secara terintegrasi agar para petani kopi ini dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha dengan pendekatan bisnis inklusif secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kedua penulis merupakan contributor utama dalam paper ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap responden di Kabupaten Sumba Barat Daya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, dan tim peneliti yang tergabung dalam program riset yaitu: Hari Siswoyo Aji, Arie Sudaryanto, Mirwan Ardiansyah Karim, Fithria Noviant, Anggriani L Biri, dan Yohanis Soe Djoe.

DAFTAR PUSTAKA

- Addisall C, Scherrer P, Weiler B, Glencross K. 2017. An ecologically and socially inclusive model of agritourism to support smallholder livelihoods in the South Pacific. *Asia Pacific J Tour Res* [Internet]. 22(3):301–315. <http://dx.doi.org/10.1080/10941665.2016.1250793>
- Andersen AD, Andersen PD. 2017. Foresighting for inclusive development. *Technol Forecast Soc Change* [Internet]. 119:227–236. <http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.06.007>
- Anderson T. 2011. Melanesian land: The impact of markets and modernisation. *J Aust Polit Econ*. 68:86–107.

- Arpin I, Barbier M, Ollivier G, Granjou C. 2016. Institutional entrepreneurship and techniques of inclusiveness in the creation of the intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services. *Ecol Soc.* 21(4):0–10.
- Bukve O. 2019. *Designing Social Science Research*. [place unknown]: Palgrave Macmillan.
- Carolina, Novianti F, Sudaryanto A, Karim, A M, Wijayanti F, Aji, Siswoyo H, Yuniati. 2017. Laporan kajian pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan teknologi tepat guna. Tambolaka.
- Carolina, Wijayanti F, Veronica V, Biri AL. 2019. The important role of coffee agroecosystem for rural development. *IOP Conf Ser Earth Environ Sci.* 374(1).
- Chamberlain W, Anseeuw W. 2019. Inclusive businesses in agriculture: Defining the concept and its complex and evolving partnership structures in the field. *Land use policy.* 83(April 2018):308–322.
- Christofi M, Leonidou E, Vrontis D, Kitchen P, Pappasolomou I. 2015. Innovation and cause-related marketing success: A conceptual framework and propositions. *J Serv Mark.* 29(5):354–366.
- Courtois P, Subervie J. 2014. Farmer bargaining power and market information services. *Am J Agric Econ.* 97(3):953–977.
- Creswell WJ. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. Knight V, editor. Los Angeles: Sage.
- Crowe S, Cresswell K, Robertson A, Huby G, Avery A, Sheikh A. 2011. The case study approach. *BMC Med Res Methodol* [Internet]. 11(1):100. <http://www.biomedcentral.com/1471-2288/11/100>
- Doggett AM. 2005. Root Cause Analysis: A Framework for Tool Selection. *Qual Manag J.* 12(4):34–45.
- Escobal J, Agreda V, Reardon T. 2000. Endogenous institutional innovation and agroindustrialization on the Peruvian coast. *Agric Econ.* 23(3):267–277.
- FAO. 2015. *Inclusive Business Models. Guidelines for improving linkages between producer groups and buyers of agricultural produce*. [place unknown]. <http://www.fao.org/3/a-i5068e.pdf>
- Fischer E, Qaim M. 2012. Linking Smallholders to Markets: Determinants and Impacts of Farmer Collective Action in Kenya. *World Dev* [Internet]. 40(6):1255–1268. <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.11.018>
- Graça P, Camarinha-Matos LM. 2017. Performance indicators for collaborative business ecosystems — Literature review and trends. *Technol Forecast Soc Change.* 116:237–255.
- Handayati Y, Simatupang TM, Perdana T. 2015. Value Co-creation in Agri-chains Network: An Agent-Based Simulation. *Procedia Manuf* [Internet]. 4(less):419–428. <http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2015.11.058>
- Herrera MEB. 2016. Innovation for impact: Business innovation for inclusive growth. *J Bus Res* [Internet]. 69(5):1725–1730. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.045>
- Hishamunda N. 2002. *Promotion of Sustainable Commercial Aquaculture in Africa Continues*. [place unknown].
- Indonesia SP. 2020. 2018 - 2020.
- Indonesian National Development Planning Agency. 2019. *Indonesia SDG's VNR*.
- Kaminski AM, Kruijssen F, Cole SM, Beveridge MCM, Dawson C, Mohan C V., Suri S, Karim M, Chen OL, Phillips MJ, et al. 2020. A review of inclusive business models and their application in aquaculture development. *Rev Aquac.* 12(3):1881–1902.
- Lundy M, Bex G, Zamierowski N, Amrein A, Hurtado JJ, Mosquera EE, Rodriguez F. 2012. *LINK Methodology: A Participatory Guide to Business Models that Link Smallholders to Markets*. [place unknown].
- Neyestani B. 2017. Seven Basic Tools of Quality Control: The Appropriate Techniques for Solving Quality Problems in the Organizations. *SSRN Electron J*.
- Patton QM. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods* 3rd Edition. [place unknown]. http://books.google.com/books/about/Qualitative_research_and_evaluation_meth.html?id=FjBw2oi8EI4C
- Permatasari PC, Basith A, Mulyati H. 2018. Model Bisnis Inklusif Rantai Nilai Kopi Arabika di Bondowoso Jawa Timur. *J Manaj Teknol.* 17(2):111–125.
- Rofi A. 2018. Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Kopi di Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende NTT. *Maj Geogr Indones.* 32(1):77–83.
- Da Silva CA, Baker D, Shepherd AW, Jenane C, Miranda-da-Cruz S. 2009. *Agro-Industries for development*. [place unknown].
- Sutton J, Austin Z. 2015. Qualitative reserch: data collection, analysis, and managment. *Can J Hosp Pharm.* 68(3):226–231.
- Todeschini BV, Cortimiglia MN, Callegaro-de-Menezes D, Ghezzi A. 2017. Innovative and sustainable business models in the fashion industry: Entrepreneurial drivers, opportunities, and challenges. *Bus Horiz* [Internet]. 60(6):759–770. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.07.003>
- Vorley B, Lundy M, Macgregor J. 2009. Business models that are inclusive of small farmers. [place unknown].

- Wijayanti F, Carolina, Karim MA, Sudaryanto A. 2019. Coffee-based appropriate technology implementation for community empowerment: Lesson learnt from rural community in Sumba Barat Daya. IOP Conf Ser Earth Environ Sci. 374(1).
- Yin, K R. 2003. Case Study Research: Design and Methods 3rd edition [Internet]. Vol 5. Dickens G, editor. United States: Sage.